

Peran Pendidikan Pajak dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

Zahra Nurul Hikmah¹, Rahman Faisal² dkk

¹Department of Accounting, Pamulang University, ² Department of Accounting, Pamulang University ³
Department of Accounting, Pamulang University
Email: ¹zahranurul.znh@gmail.com

Article History: Received on 08 Juli 2025, Revised on 10 Juli 2025, Published on 14 Juli 2025

ABSTRACT

Improving public awareness and understanding of tax obligations is crucial for national development. This community service aims to introduce tax education to high school students as a means to enhance financial literacy. Conducted at SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, the program involved 62 students in a series of lectures, interactive sessions, and practical exercises on taxation. Results showed significant improvement in students' understanding of the tax system, particularly on self-assessment and personal income tax calculations. Tax education plays a strategic role in preparing young generations to become responsible taxpayers.

Keywords: tax education, financial literacy, tax awareness, self-assessment, school outreach.

ABSTRAK

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan pendidikan pajak kepada siswa sekolah menengah sebagai upaya peningkatan literasi keuangan. Kegiatan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dengan melibatkan 62 siswa melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan praktik perhitungan pajak. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap sistem perpajakan, khususnya konsep self-assessment dan penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pendidikan pajak memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang sadar pajak.

Kata Kunci : pendidikan pajak, literasi keuangan, kesadaran pajak, self-assessment, siswa SMK

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% terhadap penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Kemenkeu, 2023). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, Indonesia telah mengadopsi sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Namun, sistem *self-assessment* ini menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Studi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, angka yang menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar pengelolaan keuangan, termasuk perpajakan. Padahal, pemahaman yang baik terhadap sistem dan kewajiban perpajakan sangat penting agar wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara benar.

dan bertanggung jawab.

Rendahnya literasi pajak juga seringkali berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat yang tidak memahami mekanisme perpajakan cenderung melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau bahkan menghindari kewajiban pajaknya. Hal ini diperkuat oleh temuan Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan perpajakan memiliki korelasi yang signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi perpajakan perlu dilakukan secara masif dan terstruktur, termasuk melalui jalur pendidikan formal.

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah melalui integrasi pendidikan pajak pada jenjang sekolah menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi yang memiliki kedekatan langsung dengan isu-isu keuangan dan administrasi pajak. Pendidikan pajak tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan praktis dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Melalui pendekatan edukatif dan aplikatif, siswa dapat memahami pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa serta mampu mengelola keuangan pribadinya secara bijak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan perpajakan kepada siswa-siswi kelas XII SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman pajak siswa sebagai bagian dari persiapan mereka memasuki dunia kerja dan menjadi wajib pajak yang bertanggung jawab. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan tri dharma pendidikan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Pendidikan Pajak dan Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan aspek krusial dalam menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial. Menurut Atkinson & Messy (2012), literasi keuangan tidak hanya mencakup pengetahuan tentang konsep dasar keuangan, tetapi juga kemampuan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. Salah satu komponen penting dalam literasi keuangan adalah pemahaman mengenai perpajakan, karena pajak berkaitan langsung dengan penghasilan, pengeluaran, serta kewajiban sebagai warga negara.

Otoritas Jasa Keuangan (2022) melaporkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada angka 49,68%, menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan keterampilan keuangan masyarakat, termasuk dalam hal perpajakan. Rendahnya literasi ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan finansial yang kurang tepat, ketidaktahuan terhadap kewajiban perpajakan, hingga rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Dalam konteks tersebut, **pendidikan pajak** menjadi elemen yang sangat strategis. Pendidikan pajak dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan sistem perpajakan kepada individu atau kelompok agar mereka mampu memahami hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016). Pendidikan ini berfungsi tidak hanya sebagai upaya penyadaran, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk perilaku warga negara yang patuh dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak.

Lebih lanjut, pendidikan pajak memiliki dua peran utama. Pertama, dari sisi individu, pendidikan pajak membekali seseorang dengan pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas ekonomi, seperti bekerja, berwirausaha, atau memiliki aset. Hal ini mendukung kemampuan individu dalam menyusun anggaran pribadi, menghindari kesalahan pelaporan, dan membuat keputusan keuangan yang legal dan optimal. Kedua, dari sisi negara, pendidikan pajak membantu membangun basis wajib pajak yang sadar dan bertanggung jawab, sehingga dapat memperluas penerimaan negara dan memperkuat sistem fiskal.

Dalam studi empirisnya, Putri & Nugraheni (2020) menyebutkan bahwa pelajar yang telah mendapatkan pendidikan pajak secara formal menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan dan memiliki kecenderungan untuk bersikap positif terhadap kewajiban pajaknya. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengenalan materi perpajakan sejak

jenjang pendidikan menengah atas dapat menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan fiskal negara.

Selain itu, teori *Civic Responsibility* dari Westheimer & Kahne (2004) menyatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai sosial dan tanggung jawab publik dapat menciptakan individu yang lebih proaktif dalam menjalankan peran kewarganegaraannya, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pendidikan pajak harus dilihat tidak hanya sebagai bagian dari kurikulum ekonomi atau akuntansi, tetapi sebagai instrumen pendidikan karakter yang mempersiapkan warga negara yang sadar hukum, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat ini, pendekatan yang digunakan menekankan pada pembelajaran aktif dan kontekstual yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap perpajakan dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti penyuluhan, simulasi, dan diskusi interaktif diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara teori dan praktik serta meningkatkan motivasi siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep perpajakan dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun profesional mereka di masa depan.

METODE PELAKSANAAN PKM

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis siswa dalam bidang perpajakan, terutama dalam konteks literasi keuangan dan kewajiban perpajakan.



Gambar 1 Penyampaian Materi oleh PKM ke Peserta



Gambar 2 Photo Bersama Pelaksana PKM dengan Peserta

1. Waktu dan Lokasi Kegiatan
 - a. Hari/Tanggal: Jumat, 26 Januari 2024
 - b. Lokasi: SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan

c. Sasaran: 62 siswa kelas XII jurusan Akuntansi

Pemilihan lokasi didasarkan pada latar belakang siswa yang relevan dengan bidang akuntansi dan keuangan, serta kebutuhan akan penguatan pemahaman perpajakan praktis menjelang kelulusan dan masuk dunia kerja.

2. Pendekatan dan Teknik Pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan kombinasi antara metode ceramah interaktif, studi kasus, simulasi praktis, dan diskusi kelompok, dengan tujuan untuk:

- a. Menyampaikan konsep dasar secara teoritis melalui penyuluhan;
- b. Memberikan pengalaman praktis melalui simulasi penghitungan PPh Orang Pribadi (PPh OP);
- c. Menggali pemahaman peserta melalui diskusi dan tanya jawab;
- d. Mengevaluasi efektivitas kegiatan melalui pengamatan langsung dan refleksi siswa.

Seluruh materi disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari.

3. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui lima tahapan utama, sebagai berikut:

a. Persiapan dan Koordinasi

Tim pelaksana melakukan komunikasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah guna menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan, serta menyesuaikan jadwal pelaksanaan dengan agenda sekolah. Pada tahap ini, tim juga menyusun perangkat kegiatan seperti modul materi, lembar simulasi, dan alat evaluasi.

b. Penyuluhan dan Edukasi Teoritis

Kegiatan diawali dengan sesi penyuluhan mengenai konsep dasar pajak, peran pajak dalam pembangunan, jenis-jenis pajak, serta pentingnya literasi keuangan. Materi disampaikan menggunakan presentasi visual yang menarik dan komunikatif untuk membangun antusiasme siswa.

c. Simulasi Praktik Perpajakan

Siswa diberikan studi kasus sederhana untuk menghitung penghasilan kena pajak dan kewajiban PPh Orang Pribadi berdasarkan tarif yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan bimbingan dari tim fasilitator. Pendekatan *case-based* ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan numerik siswa.

d. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah praktik selesai, dilakukan sesi diskusi terbuka untuk membahas kesulitan atau pertanyaan yang muncul selama simulasi. Fasilitator mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat dan merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan.

e. Evaluasi dan Umpaman Balik

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi keterlibatan siswa selama kegiatan dan pertanyaan reflektif untuk mengukur peningkatan pemahaman. Siswa juga diminta memberikan umpan balik terkait manfaat dan kekurangan kegiatan.

4. Justifikasi Metode

Metode ini dipilih berdasarkan prinsip andragogi dan teori pembelajaran aktif (*active learning*), yang menyatakan bahwa pemahaman konsep akan lebih baik bila siswa dilibatkan langsung dalam proses eksplorasi, aplikasi, dan refleksi (Bonwell & Eison, 1991). Simulasi perhitungan PPh OP menjadi sarana kontekstualisasi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan pembentukan sikap positif terhadap perpajakan, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan pajak di masa depan.

HASIL PKM DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan memperoleh respons yang sangat positif dari peserta. Sebanyak 62 siswa kelas XII jurusan Akuntansi mengikuti kegiatan secara aktif dari awal hingga akhir. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis siswa dalam aspek perpajakan dan literasi keuangan.

1. Peningkatan Pemahaman Materi Perpajakan

Sebelum kegiatan dimulai, banyak siswa yang belum memahami konsep dasar perpajakan, terutama terkait fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa serta sistem pelaporan pajak. Berdasarkan observasi awal dan diskusi informal, mayoritas siswa menganggap bahwa pajak adalah konsep yang rumit dan hanya relevan bagi orang dewasa yang telah bekerja. Namun, setelah dilakukan penyuluhan dan simulasi, terjadi peningkatan pemahaman pada tiga aspek utama:

- a. Pemahaman terhadap sistem perpajakan Indonesia, termasuk peran Direktorat Jenderal Pajak dan asas self-assessment;
- b. Pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, baik pusat maupun daerah, serta urgensi kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional;
- c. Kemampuan dalam melakukan perhitungan sederhana PPh Orang Pribadi, menggunakan data studi kasus sesuai dengan tarif progresif yang berlaku.

2. Efektivitas Pendekatan Pembelajaran Kontekstual

Metode penyampaian yang digunakan dalam kegiatan ini mengacu pada pendekatan *contextual teaching and learning (CTL)*, di mana pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Materi perpajakan yang semula dianggap kompleks dan teoritis disederhanakan melalui penggunaan bahasa yang komunikatif, analogi yang dekat dengan dunia siswa, serta kegiatan praktik langsung melalui simulasi kasus wajib pajak individu.

Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah kuis berhadiah dan diskusi kelompok, yang tidak hanya meningkatkan fokus dan partisipasi, tetapi juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan inklusif. Berdasarkan refleksi lisan yang disampaikan siswa pada akhir kegiatan, banyak dari mereka mengaku bahwa kegiatan ini merupakan kali pertama mereka mempelajari pajak secara praktis dan aplikatif.

3. Antusiasme dan Dampak Psikologis

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan rasa ingin tahu dan motivasi belajar mengenai topik perpajakan. Hal ini tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, baik terkait materi yang disampaikan maupun tentang pengalaman nyata membayar dan melaporkan pajak. Bahkan, beberapa siswa mengusulkan agar materi perpajakan diberikan lebih mendalam dalam kurikulum sekolah.

Selain itu, pendekatan edukatif yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam memahami dan menyampaikan kembali informasi yang telah mereka pelajari. Menurut teori *constructivism* dalam pendidikan (Vygotsky, 1978), proses belajar yang melibatkan partisipasi aktif siswa dan interaksi sosial akan membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama.

4. Relevansi Kegiatan dengan Dunia Kerja

Sebagai siswa jurusan akuntansi, pemahaman tentang perpajakan memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan konseptual siswa, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kompetensi dasar yang dapat memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia profesional.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan karakter dan kesiapan karier siswa. Hasil kegiatan mendukung temuan Pratama & Indrayani (2020) yang menyatakan bahwa pelatihan praktis berbasis simulasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan siswa terhadap sistem pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pajak yang dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap perpajakan dan pengelolaan keuangan. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep dasar perpajakan, tetapi juga berhasil membentuk sikap positif siswa terhadap pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara serta pengelolaan keuangan pribadi. Pendidikan pajak yang dikemas secara kontekstual dan aplikatif mampu memperkuat literasi keuangan siswa sejak usia sekolah, sehingga dapat menjadi pondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang sadar pajak dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Sehubungan dengan hasil tersebut, disarankan agar pendidikan pajak memperoleh porsi yang lebih kuat dalam kurikulum SMK, khususnya di jurusan yang berkaitan langsung dengan bidang akuntansi dan keuangan. Kegiatan pengabdian serupa hendaknya dilakukan secara berkala dan merata di berbagai sekolah, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh siswa dari berbagai latar belakang. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan menjalin kemitraan strategis dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan menengah dalam menyelenggarakan program edukasi pajak praktis sebagai bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi, sekaligus kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, K. A. A. (2019). *Pengertian pajak penghasilan*. Pajakku. <https://www.pajakku.com>
- Fitriya. (2024). *Panduan pajak penghasilan*. Klikpajak. <https://klikpajak.id>
- Lathifa, D. (2022). *Perpajakan Indonesia*. OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Literasi keuangan*. <https://ojk.go.id>
- Pratiwi, R. Y. (2022). *Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia*. Pajak.com. <https://www.pajak.com>
- PuskoMedia Indonesia. (2023). *Pajak dan literasi keuangan*. <https://www.bhuanajaya.desa.id>
- Ulfah, M., Kuswanti, H., & Thoharudin, M. (2021). Pendidikan literasi keuangan dalam pembelajaran ekonomi di SMA dan SMK. *Jurnal Pendidikan*, 7(1), 194–204.
- Wardokhi, W., Ruhiyat, E., & Suripto, S. (2023). Penerapan konsep Pentuple Bottom Line pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 105–117.